

**KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM EKONOMI ISLAM
MENURUT AFZALUR RAHMAN DI BUKU
ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Oleh

EKA MURLAN
NIM. 10625003929

PROGRAM S.1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT AFZALUR RAHMAN DI BUKU ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAMIC** ” ditulis dengan latar belakang bahwa Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi

Menurut Islam harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara’, bukan bebas mengelola secara mutlak. Alasannya, ketika dia mengelola hartanya dengan cara yang tidak sah menurut syara’, seperti menghambur-hamburkan, maksiat, dan sebagainya. Maka Negara wajib mengawalinya dan melarang untuk mengelolanya serta wajib merampas wewenang yang telah diberikan Negara kepadanya. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, bagaimana implementasi konsep kepemilikan harta menurut Afzalur Rahman pada saat ini dan bagaimana analisis konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, untuk mengetahui bagaimana Implementasi konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman pada saat ini dan untuk mengetahui bagaimana analisis pemikiran Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain bahan primer dan bahan skunder. Bahan primer merupakan karya Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dibuku Dotrin Ekonomi Islam jilid ke-1 dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Adapun bahan skunder yaitu literature-literatur lain yang berhubungan dan sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini dan selanjut dianalisa.

Menurut Afzalur Rahman Konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak

untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.

Pada saat ini implementasi dari kepemilikan harta dikalangan muslim sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Setiap orang berlomba-lomba dalam mencari harta dengan cara-cara yang tidak baik yang lebih mengarah kearah kapitalis dan sosialis, yaitu setiap orang selalu merasa penguasa mutlak terhadap harta yang dimilikinya, tanpa memikirkan orang lain, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikannya, hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya alam dan manusia, akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa diperoleh dengan cara yang halal baik bentuk zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ABTSRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Sekilas Tentang Riwayat Hidup Afzalur Rahman 12

B. Karya-karya Afzalur Rahman 15

BAB III TEORI EKONOMI TENTANG KONSEP KEPEMILIKAN HARTA

A. Pengertian Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam 20

B. Pembagian Hak Milik 24

C. Pengertian Harta..... 25

D. Pembagian Harta 26

E. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik..... 32

F. Landasan Hukum Memiliki Harta	37
 BAB IV KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM EKONOMI ISLAM	
MENURUT AFZALUR RAHMAN DI BUKU ECONOMIC	
DOCTRINES OF ISLAM	
A. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman.....	42
B. Implementasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam	
Menurut Afzalur Rahman Dalam Kehidupan	51
C. Analisa Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut	
Afzalur Rahman	61
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaanya dalam suatu kelompok.¹ Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.²

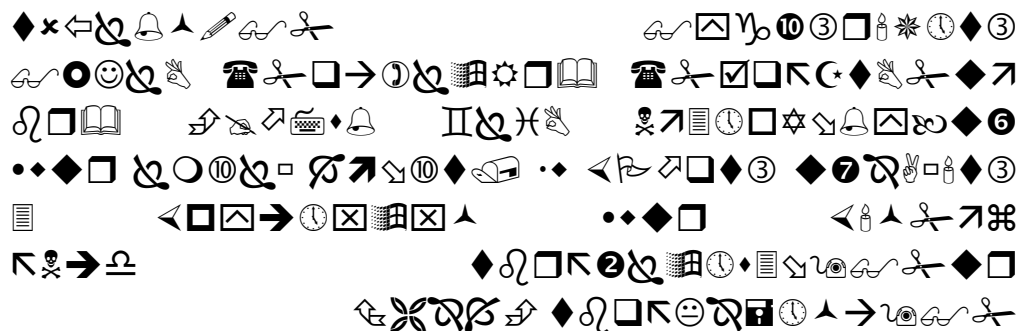
Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor,³ salah satunya sesuai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerapkan tentang aturan

¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 5

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31

³ S. Wiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gita Karya, 1988), h. 19

berekonomi, termasuk elemen-elemen didalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi.⁴ Islam membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal. Sebagaimana dalam firman Allah QS Al Baqarah : 254.



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dholim”. (QS Al baqarah : 254)⁵

Ayat Al-Qur’an tersebut dengan jelas membenarkan hak individu untuk dimiliki dan membelanjakan harta bendanya. Islam menjamin keselamatan harta benda milik umatnya dan mengancam pelaku pencurian dan perampokan yang membahayakan keselamatan harta benda yang dimiliki umatnya. Oleh karena itu umat Islam diperingatkan supaya menjauhkan diri dari perbuatan mengambil harta benda orang lain dengan cara yang haram yang merupakan dosa besar.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 9

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro, 2003), cet. 10, h. 33

Untuk itu Islam menekankan adanya penyebaran harta kekayaan sehingga menghindari dari perbuatan dosa tersebut. Dimana penyebaran harta kekayaan tersebut kesemua bagian untuk menjaga keutuhannya dan mencegah penimbunan harta. Dengan demikian Islam memberikan suatu landasan adanya suatu sistem ekonomi yang diterapkan dengan cara yang sangat mudah untuk memberikan inisiatif individu, pemberian hak milik, tetapi harus ada batasan-batasan yang membantu pembentukan keseimbangan secara benar antara individu dan umum.⁶

Dilihat dari kondisi sistem perekonomian yang telah berkembang saat ini merupakan dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.⁷ Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung pada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis lebih memprioritaskan individu daripada kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu.⁸ Dari sini muncul masalah ekonomi, menurut mazhab Baqir berpendapat bahwa hal ini muncul karena adanya distribusi yang

⁶ HA Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), h. 19

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Muhammad al 'Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Terjemahan oleh Abu Ahmad dan Umar S, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), h. 11

tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁹

Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas¹⁰.

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Hal ini mengakibatkan adanya eksploitasi sehingga muncul dua kelas yaitu sebuah kelas minoritas diantaranya menguasai dan mengendalikan alat-alat produksi (Kapitalis) dan sebuah kelas mayoritas yang tidak memiliki alat-alat produksi (Tenaga upahan). Dimana tenaga upahan ini tidak punya pilihan lain kecuali bekerja untuk kapitalis.¹¹

Berdasarkan kenyataan diatas maka sangat keliru bahwa cara untuk memajukan ekonomi hanya dapat dicapai dengan mengikuti mazhab kapitalisme saja. Padahal kalau melihat dari esensi ekonomi itu sendiri, dikatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IT Indonesia, 2002), h. 14

¹⁰ *Ibid*, h. 21-23

¹¹ Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 7

untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai kebutuhan.¹²

Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna mencakup seluruh kehidupan maka kita wajib berpendirian bahwa Islam sebagai dien yang telah menggariskan prinsip-prinsip kehidupan mencakup berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Dan Islam mempunyai corak ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat dalam praktek sistem ekonomi kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan semata.¹³ Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata, dan merupakan ibadah bila dalam kegiatannya itu mengharapkan ridho Allah Swt.¹⁴ Untuk itu Islampun memandang konsep kepemilikan harta berbeda dengan kapitalisme.¹⁵ Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan.¹⁶ Kapitalisme mempunyai asumsi bahwa manusia itu serakah dan materialistis.¹⁷

¹² Endang Saifudin Anshori, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta : , CV. Rajawali, 1986), h. 172

¹³ Wahyudi Kumorotomo, *Op. cit*, h. 33

¹⁴ *Ibid*, h. 25

¹⁵ *Op. cit*, h. 213

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 64

¹⁷ *Op. cit*, , h. 20

Dalam keterkaitan dengan konsep kepemilikan harta di atas, orang tak bisa mengabaikan nama Afzalur Rahman. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan dengan dalil yang kuat serta penyampainya yang mudah dipahami selain itu juga banyak dijadikan rujukan berbagai kalangan cendekiawan muslim, terutama menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, selain itu karya-karya nya juga banyak diterima berbagai kalangan manca negara bahkan mendapat berbagai penghargaan dari berbagai kalangan.¹⁸ Sepanjang hidupnya afzalur rahman merupakan salah seorang cendekiawan dan praktisi ekonomi yang handal yang berasal dari Pakistan dan menjabat sebagai Deputy Secretary General dari Muslim School Trust London dan ia wafat pada tahun 1998. Diantara beberapa karyanya “*Economic Doctrines Of Islam*” atau Doktrin Ekonomi Islam , Muhammad Sebagai Pedagang dan Muhammad sebagai seorang meliter.¹⁹

Dalam karyanya *Economic Doctrines Of Islamic Afazalur rahman* mengemukakan tentang konsep kepemilikan harta yaitu *recognizing the right of individual for posses the property. In spite of that he gave same limitation in order that is not inflicted of common infortune people. Because of that, Afzalur rahman stressed the limit of individual freedan in reach the property, the are :*

1. *Individual is free in struggling of their economic as long as it is not break the rights of others or endanger of common infortune people*

¹⁸ <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/04/ensiklopedimuhamad.htm> tgl. 08 April 2011

¹⁹ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Shuarna Bhummy, 1997), h.26

2. *For defend of their life, they have to do right ful and leaving that fatidden to reach the property and not taking the fortidden things.*

Menurut Afzalur Rahman konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam yaitu diakuiinya hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.²⁰ Oleh karena itu Afzalur Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta, diantaranya yaitu :

1. Individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat).
2. Guna mempertahankan kehidupannya ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram.²¹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi harta sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disayari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disayari'atkan pula.²²

²⁰ *Op. cit.* h. 8

²¹ Afzalur Rahman, *Op.cit* h. 77

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h. 86.

Abdul Manan juga berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Swt, dan manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi.²³

Namun jika kita lihat pada kenyataannya, yang terjadi saat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang melakukan hal-hal sebenarnya telah dilarang dalam Islam. Dan hal itu sangat menyimpang dengan apa yang telah dikonsepskan dalam Islam itu sendiri, demikian juga halnya yang telah dikonsepskan Afzalur Rahman mengenai kegiatan kepemilikan harta. Seperti halnya dalam memperoleh dan membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebutuhan yang ada, ditambah sifat kikir yang ada pada sebagian banyak orang yang mempunyai harta yang melimpah. Bahkan terkadang masyarakat tidak sadar telah melakukan tindakan mubazir dan pemborosan (*israf*) seperti pada acara-acara di hotel mewah yang mubazir makanan, dan di acara-acara pesta ulang tahun, pernikahan. Bahkan ada yang membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Membeli barang-barang mewah terkadang mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat pokok dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **“KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT AFZALUR RAHMAN DI BUKU ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM”**

²³ M.A. Mannan, *Op.cit*, h.72

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dan agar lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada **Bagaimana Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman ?
2. Bagaimana Implementasi konsep kepemilikan harta menurut Afzalur Rahman pada saat ini ?
3. Analisa konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman pada saat ini.

- c. Untuk menganalisa pemikiran Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam.
- b. Memberikan acuan yang jelas bagi penulis khususnya dan pembaca umum dalam memahami tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan study strata S1 untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka karya ilmiah yang terarah dan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat telaah pustaka (*library research*), tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan dan mengumpulkan data primer, skunder dan bahan tersier.

- a. Data primer yaitu merupakan literatur Afzalur Rahman dalam bukunya Dokrin Ekonomi Islam (*Economic Doctrines Of Islam*) dari Jilid I, dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (*Muhammad As A Trader*) yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji, yaitu melacak konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam, diambil dari buku-buku ekonomi Islam dan buku-buku ekonomi yang relevan dari permasalahan tersebut diantaranya karangan Prof.M.Abdul Manan,M.A.Ph.D dalam karya Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dr.M. Umer Chapra, The Future Of Economics An Islamic Perpective, Syed Nawab Haider Naqwi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, Adiwarmarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, Yusuf Qordawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam dan literature-literatur lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini
- c. Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan primer dan bahan

skunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Agar diperoleh informasi yang baru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan dicari dan dipilih harus relevan mutakhir.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini dan selanjut dianalisa.

4. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari sini pada akhirnya akan digunakan untuk menilai sesuatu pemikiran, kejadian dan ditarik pada pengetahuan khusus.²⁴
- b. Metode Induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut.²⁵

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini penulis

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: PPF UGM, 1963), h. 42

²⁵ *Ibid*, h. 43

mensistematis menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab, pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini meliputi alasan pemilihan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, metode pengumpulan data, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Dalam bab ini memaparkan tentang riwayat hidup Afzalur Rahman, riwayat pendidikan dan pekerjaan Afzalur Rahman serta karya-karya ilmiah Afzalur Rahman.

Bab III : Dalam bab ini menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Pengertian Konsep Kepemilikan Harta, Pembagian Hak Milik, Pengertian Harta, Pembagian Harta, Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Miliknya, Dasar Hukum Memiliki Harta

Bab IV : Dalam bab ini menjelaskan Bagaimana Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, Bagaimana Implementasi Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam menurut Fazalur Rahman pada saat ini dan Analisa Konsep Kepemilikan Harta menurut Afzalur Rahman.

Bab V : Penutup, pada bab ini dirumuskan kesimpulan-kesimpulan, saran-saran serta penutup pada akhir penulisan.

BAB II

BIOGRAFI AFZALUR RAHMAN

A. Riwayat Hidup Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1915-1998) merupakan seorang Atlet dan berpendidikan sarjana Islam. Afzalur Rahman seorang cendekiawan muslim autodidak asal Pakistan. Dia berpendidikan sarjana Islam dan sempat mengenyam pendidikan di Islamia college, Lahore saat lembaga itu masih di kepalai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis The Glorious Qur'an (terjemah dan tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang muslim). Dari Pakistan Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) pada tahun 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. Met memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris seperti Necoham Hackney School, Bradford, dan lain-lain²⁶.

Pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET lalu mendirikan The Muslim School Trust (MST) yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbetik dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Maka sepanjang decade 80-an terbitlah 8 volume encyclopedia of seerah Muhammad, sepeninggal Afzalur Rahman pada tahun 1998 ditemukanlah volume ke 9 dari encyclopedia tersebut yang belum pernah diterbitkan.

²⁶ <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/04/ensiklopedimuhamad.htm> tgl. 08 April 2011

Sepanjang hidupnya Afzalur Rahman sudah puluhan karya yang dihasilkan olehnya. Di antara yang belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah *Islam: Faith and Practice, liberty: Readings in Islamic Political Philosophy*. Sebagai Ketua Dewan Editor *Encyclopaedia of reesah*, Afzalur Rahman memperkaya ensiklopedianya dengan kontribusi artikel dan kutipan dari banyak ulama dan cendekiawan Muslim level Internasional, baik dari masa lalu maupun masa modern. Di antara ulama zaman klasik yang karyanya dirujuk adalah para penyusun kitab hadist, Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, Ibn Sa'ad, Ibn Katsir. Adapun ulama dari masa modern yang dirujuk adalah Muhammad Quthb, Syibli Nu'mani dan lain-lain²⁷.

Publik Indonesia sudah mengenal karya-karya Afzalur Rahman, diantaranya Muhammad sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumi pada 1995. Buku tersebut merupakan buku ketiga pada vol. II *Encyclopaedia of Seerah Muhammad* (jilid 3 dari *Ensiklopedi Muhammad Saw.*). Karyanya yang lain, *Quranic Sciences*, diterbitkan Mizania pada 2007 dengan judul *Ensiklopediana Ilmu-ilmu dalam Al-Quran*, dan cukup diminati pembaca tanah air. Kalangan akademisi, praktisi, dan peminat ekonomi Islam di Indonesia juga mengenal karya referensialnya, *Doktrin Ekonomi Islam* (4 jilid), terbitan Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995. Selain itu, Muhammad sebagai Pemimpin Militer (jilid 8 dari *Ensiklopedi*

²⁷ <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/08/Doktrin> Ekonomi Islam.htm tgl. 08 April 2011

Muhammad Saw) sempat diterbitkan secara terpisah oleh salah satu penerbit di Indonesia²⁸.

Ada 7 Keistimewaan Ensiklopedi Muhammad:

1. Satu-satunya ensiklopedi yang mengupas pribadi Muhammad dari sepuluh aspek dan profesi terpenting manusia dalam hidup: sebagai nabi, pribadi mulia, pedagang, suami dan ayah, pendidik, pecinta ilmu, negarawan, pemimpin militer, pejuang kemanusiaan, dan hakim.
2. Metode penulisan gabungan antara metode kronologis dan tematis. Metode kronologis menyampaikan sejarah hidup nabi secara urutan waktu dari kelahiran nabi, hingga wafat (dijumpai dalam paruh pertama jilid 1). Sedangkan metode tematis adalah metode penulisan yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari nabi (dijumpai dalam keseluruhan jilid)²⁹.
3. Ditulis oleh cendekiawan terkemuka Pakistan, Afzalurrahman. Beliau dikenal sebagai penulis buku *Muhammad as A Trader - Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* dan *Qur'anic Sciences - Ensiklopedia Ilmu-ilmu dalam Al Qur'an*, yang menjadi buku laris dan diminati pembaca di tanah air. Hampir selama 10 tahun (sepanjang dekade 80-an), Afzallurhaman mencurahkan hidupnya untuk menulis Ensiklopedi ini. Kini

²⁸ [http : // Anak muslim pintar. Blog spot.com/2009/10/Ensiklopedia Muhammad-baru dari Mizan.html](http://Anakmuslimpintar.blogspot.com/2009/10/EnsiklopediaMuhammad-barudariMizan.html). tgl 13 April 2011

²⁹ *Ibid*

publik Indonesia dapat menikmati karya monumental Afzalurrahman dalam versi yang lebih komplit dengan pengemasan yang lebih segar.

4. Merujuk pada kitab-kitab karya ulama klasik: kitab hadis *sittah*, *Sirah* Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, Ibn Sa'd, Tabari, dan tafsir *mu'tabarah* (Ibn Katsir, dll.)³⁰.
5. Diperkaya dengan kontribusi sekian banyak artikel dan tulisan ulama terkemuka dunia Islam sejak zaman klasik hingga modern seperti Al-Ghazali, Ibn Al-Qayyim, Syah Waliyullah, Abul A'la Maududi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Maurice Bucaille, Hasan Al-Nadwi, Muhammad Asad, Hamka, Mustafa Siba'i, Syaikh Abu Zahra, dll.
6. Di sunting dan diperkaya oleh redaksi Pelangi Mizan sehingga menjadi lebih ringkas, padat, informatif, dengan tambahan materi dan ilustrasi visual yang menarik dan artistik. Materi tambahan hasil suntingan redaksi Pelangi Mizan diambil dari berbagai sumber, dalam maupun luar negeri³¹.
7. Rujukan silang ke buku-buku lain dalam program Life Long Learning lainnya seperti *Atlas Dunia Islam*, *Ensiklopedi Islam Modern*, dan *Tafsir Muhammad Asad*.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

B. Karya-karya Afzalur Rahman

Adapun karya-karya Afzalur Rahman antara lain :

1. *Economic Dotrines Of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)* buku ini terdiri dari empat jilid, jilid pertama menjelaskan prinsi-prinsip sistem ekonomi Islam dan menguraikan ke empat faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Jilid ke dua menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa faktor produksi. Jilid ke tiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam yaitu suku bunga nol persen (*zero rate of interest*). Dan juga menjelaskan tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta kedudukannya dalam sistem Islam. Jilid ke empat menjelaskan tentang sistem moneter, Bank dengan bebas dan Asuransi tanpa bunga serta standar moneter Internasional³².
2. *Muhammad As a Trader (Muhammad : encyclopedia of seerac)* Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini mengupas tentang peran dan aktifitas Muhammad, praktek-praktek perdagangan, etika bisnis soal keadilan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi peran Negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi pemakmuran. Republika 30 Agustus 1996, memuat bahwa buku Muhammad sebagai seorang pedagang ini merupakan panduan berdagang bagi umat Islam, buku ini sarat dengan pembahasan mengenai kehidupan Rasullullah dan posisinya sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada

³² Afzalur Rahman, *Op.cit*, h. 137.

nilai-nilai ilahi. Buku ini mendapat apresiasi yang beragam dari berbagai media, diantaranya : Majalah Gatra 02 November 1996, Memuat bahwa buku ini tidak hanya menceritakan praktek seorang pedagang tetapi lebih banyak berbicara mengenai sistem ekonomi Islam. Dengan menonjolkan judul Muhammad sebagai seorang pedagang, akan tercipta citra Islam sebagai agama yang ramah dengan perdagangan dan mengandung ajaran yang membentuk etos kerja serta etika bisnis.

Bisnis Indonesia, minggu III, September 1996. bahwa buku ini patokan berbisnis bagi seluruh umat Islam.

Warta ekonomi, 30 September 1996, memuat bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi bangsa kita yang sedang menumbuhkan kelas wirausaha muda yang tangguh di era perdagangan bebas, tidak asal dari pengusaha patron-elien. Juga berguna bagi upaya pengembangan model ekonomi yang berkeadilan.

Majalah Forum, 23 September 1996, memuat bahwa buku "*Muhammad sebagai seorang pedagang*" sarat dengan studi mengenai fikiran berbagai pakar baik barat maupun muslim dan mulai dari ekonomi Keynes sampai Abul A'ala al-Maududi. Satu hal yang selama ini penulis maupun yang membahas etika bisnis seorang muslim dengan pribadi prima, bisnis Indonesia, minggu III, September 1996, bahwa buku ini sebagai patokan berbisnis bagi seluruh umat Islam.³³

³³ <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/08/Doktrin> Ekonomi Islam.htm tgl. 08 April 2011

3. Nabi Sebagai Seorang pemimpin Militer, Penerbit Hamzah, Penerjemah Anas Sidik, edisi revisi 1997, buku ini berisikan tentang betapa hebatnya Nabi selain sebagai seorang Rasul ia juga seorang pemimpin militer yang tangguh. Ini sebagai contoh kesempurnaan, keabadian dan keindahan. Keberhasilan dalam bidang militer sebagai bukti bahwa Islam telah dahulu mengetahui kemiliteran yang dapat diketahui ketika Nabi di kepung di Madinah, Nabi Muhammad menghadapinya dengan keberanian dan meraih kemenangan. Kearifan dan kecakapan Nabi Muhammad sedemikian efektif, dan beliau berhasil menggunakan berbagai faktor dalam strategi perang dan operasi militernya secara umum, sehingga dikagumi oleh generasi pemimpin militer profesional berikutnya. Adapun bukti lain tentang kebesaran Muhammad sebagai seorang pemimpin militer adalah gerakan strategisnya dalam mengejar musuh kecuali kalau mereka berubah pikiran dan kembali ke medan perang³⁴.
4. Indek Al-Quran, penerbit Bumi Aksara 1997, terjemahan Drs. Ahsin. buku ini berisikan tentang pengertian kata-kata yang terdapat pada Al-Quran. Yang mana setiap pengertian bahasa yang sulit untuk dipahami atau ada persamaan kata-kata yang disetiap ayat-ayat yang sama, dan dapat diterjemahkan dengan mudah oleh para musafir.
5. Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an, penerbit PT. Mizan Pustaka 2007, buku ini lebih dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan kepada generasi muda Muslim khususnya, dan umat manusia pada umumnya

³⁴ Afzalur Rahman, *Op.cit* , h. 87.

tentang khasanah sains yang bersumber dari Al-Qur'an yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada studi-studi dan kebudayaan Manusia³⁵.

³⁵ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), Cet. Ke-1. h. 92.

BAB III

TEORI EKONOMI TENTANG KONSEP KEPEMILIKAN HARTA

Status manusia mempunyai sifat yang khas, selaras dan sejalan dengan konsep hak milik dalam Islam. Konsep kapitalisme maupun komunisme berbeda dan bertolak belakang dengan konsep dalam Islam, tak satupun dari kedua sistem diluar Islam tersebut yang berhasil menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Kebebasan dalam hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme dan penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialisme. Konsep kapitalisme tentang kepemilikan ini merupakan bagian dari empat pokok kebebasan yang diinginkan oleh mereka yaitu :

1. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
2. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*)
3. Kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*)
4. Kebebasan bertingkah laku (*personal freedom*)

Paham kapitalisme memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh rakyat untuk mempunyai hak kepemilikan, dimana para individu bebas menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian secara kuantitas penganut kapitalisme tidak membatasi kepemilikan.

Sedangkan sosialisme menghapuskan hak milik pribadi dan mengalihkan semua hak milik menjadi hak milik Negara.³¹ Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan kezaliman dan penyimpangan sehingga harus

³¹ Solahuddin,M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 63

dihapus. Segala bentuk usaha yang mengarahkan kepada pengakuan hak milik pribadi harus dimusnahkan, walaupun dengan jalan kekerasan dan membangkitkan dengki, satu prinsip penting yang harus diwujudkan adalah sama rata dan sama rasa.

Dalam mencapai tujuannya, paham sosialis bersandar pada kekuasaan, tepatnya kekuasaan Negara dan kediktatoran pemimpin, Negara menurut paham sosialis merupakan penggerak dan kompas bagi perekonomian rakyat. Individu sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta Negara. Tugas rakyat hanya satu yaitu sebagai abdi negara dan melaksanakan tugas dari penguasa.³²

A. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:

“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.³³ Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta

³² Yusuf Qordawi, *Op.cit*, h. 70

³³ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 33.

tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”³⁴

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para *Fuqaha*, antara lain:

1. Ta’rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa’:

Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.³⁵

2. Ta’rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily

Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i.³⁶

Dari ta’rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan term istishash. Dalam ta’rif tersebut terdapat dua istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta, diantaranya :

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.

³⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al Madkhal al Fiqh al ‘Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240

³⁵ *Ibid.*, h. 241.

³⁶ Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, h. 57

2. Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara’ menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak”.³⁷

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.³⁸

Ta’rif diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara al mal dan milkiyah, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).

³⁷ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu :

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.³⁹

Menurut Kamus Hukum, *Milk* (Ar), *Eigendom* (Bld), *Property* (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.⁴⁰ Dalam kamus al-Munjid, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlikatan* dan *mamlukatan*.⁴¹

³⁹ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 75

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *loc. cit.*

B. Pembagian Hak Milik

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
2. Hak milik umum (*al-milikiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
3. Hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.⁴²

⁴² Solahuddin,M, *Op.cit*, h. 66

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaanya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.⁴³

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.⁴⁴

C. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* atau jamakannya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah *ma malakatahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai).⁴⁵ Untuk itu, milik dalam *lughoh* (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.”⁴⁶

⁴³ *Ibid*, h. 66-114

⁴⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), h. 43

⁴⁵ *Op.cit.*,h. 40

⁴⁶ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998),h. 8

Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian (An-Nabhani 1990). Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).⁴⁷

D. Pembagian Harta

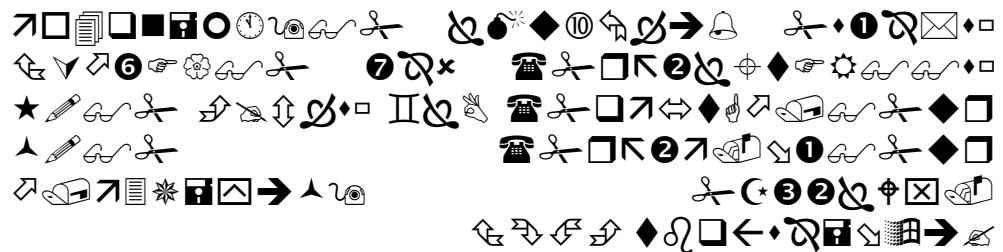
Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah-ruah. Itulah sebabnya, sungguh disayangkan dan sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt,⁴⁸

Kehadiran harta benda tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan usaha yang kuat, karena itu Allah Swt, menerangkan tentang harta tersebut,

⁴⁷ *Loc.cit.* Hal.40

⁴⁸ Ruqaiyah Waris Masgood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Listas Pustaka, 2003),h. 6

dan sebagai karunia dari Allah Swt, dan mengajak umat manusia untuk berusaha dalam menggapainya.⁴⁹ Firman Allah Swt, surat Al-Jum'ah Ayat 10



Artinya : *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁵⁰

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim

- a. *Mal Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutaqqawim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak

⁴⁹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Semarang : Kalam Mulia, 1987),h. 39

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit* h. 441

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 19

bisa dimanfaatkan karena cara penyembeliannya batal menurut syara'.

- b. *Harta Ghair Mutaqawim* yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. *Harta ghair mutaqawim* ialah kebalikan dari *harta mutaqawim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk *harta Ghair mutaqawim*, karena jenisnya.

2. *Mal Mistli* dan *Mal Qimi*

- a. *Harta Mistli* yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.
- b. *Harta Qimi* yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

Dengan kata lain *harta mistli* adalah harta yang jenisnya diperoleh dipasar secara terpisah, dan *qimi* adalah harta yang jenis sulit didapat dipasar, bisa diperoleh tapi jenis berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Misalnya seseorang membeli senjata api dari rusia akan kesulitan mencari imbangannya di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada. Maka senjata api Rusia di Indonesia termasuk *harta qimi*, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk *harta mistli* karena barang ini tidak sulit untuk diperoleh. *harta* yang disebut

qimi dan mistli bersifat sangat relative dan kondisional, artinya bisa saja di suatu tempat atau Negara yang satunya menyebut qimi dan di tempat yang lain menyebut sebagai harta mistli.

3. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

- a. *Harta istihlak* yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak haquqi. Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Istihlak haquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.
- b. *Harta Isti'mal* yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

4. Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul

- a. Harta Manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain.
- b. Harta Ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk ghair

manqul karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

5. Harta Ain dan Harta Dayn.
 - a. *Harta ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya.
 - b. *Harta dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.
6. Mal al-ain dan Mal al-naf'i (manfaat)
 - a. *Harta aini* yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan yang lainnya.
 - b. *Harta nafi'I* ialah *a'radl* yang berangsur-rangsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.
7. Harta Mamluk, Mubah, Mahjur
 - a. *Harta Mamluk* ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.
 - b. *Harta Mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.
 - c. *Harta Mahjur* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk

masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid-mesjid, kuburan-kuburan dan lainnya.

8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

- a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung.
- b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.

9. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

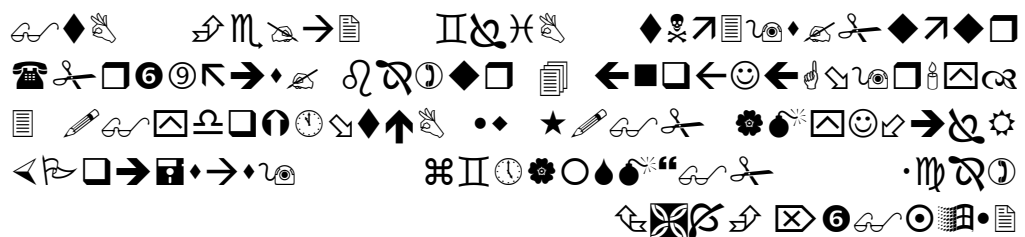
10. Harta Khas dan Am

- a. *Harta Khas* ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

- b. *Harta Am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.⁵² Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi.⁵³

E. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik

Hubungan manusia dengan benda dan kekuasaan manusia atas segala sesuatu yang berada disekitarnya merupakan masalah yang peting dalam sistem ekonomi Islam, dimana dalam Islam sendiri sudah terdapat ketentuan-ketentuan pokoknya didalam al-qur'an, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ibrahim ayat 34.



Artinya :*Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).*⁵⁴



⁵² Hendi Suhendi *Ibid.*, h. 19-27

⁵³ M.Solahuddin, *Op.cit.*, h.98

⁵⁴ Depertemen Agama RI, *Op.cit* h. 207

Berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada perinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas sesuatu benda hanya ada pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.

Mengenai hubungan manusia dengan benda atau hak milik seseorang atas harta kekayaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Cara memperoleh hak milik

Dalam memperoleh hak milik atau harta kekayaan, al-qur'an memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah dengan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, melalui pewarisan dan dengan hibah. Diantara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah dengan usaha melalui kerja keras dengan mempergunakan akal dan tenaga. Dan Allah melarang memperoleh harta dengan cara merampas harta benda orang, mencuri, menipu, melakukan pengelapan, menyuap dan disuap, berjudi, dan memakan riba.

b. Fungsi hak milik

Diantara fungsi hak milik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an adalah sebagai berikut :

1. Harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain
2. Harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.
3. Diantara harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya
4. Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku.

c. Cara memanfaatkan

Cara memanfaatkan atau menggunakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, al-qur'an juga memberikan beberapa pedoman, diantaranya :

1. Tidak boleh boros dan tidak pula kikir
2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta
3. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, antara lain melalui :
 - a) Shadaqoh atau sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.

- b) Infaq, yaitu pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.
- c) Hibah, yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan social, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.
- d) Qurban, yaitu penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan. Dimana hikmahnya dapat membina rasa kasih sayang, bantu membantu sesama manusia, sarana pendidikan ketulusan, keikhlasan dalam melaksanakan perintah tuhan dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia lain dalam pergaulan hidup.
- e) Zakat, adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.
- f) Wakaf, artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang telah diwakafkan itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas

bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan umum.⁵⁶

F. Landaasan Hukum Kepemilikan Harta

Salah satu butir Demokrasi Ekonomi dalam GBHN adalah rumusan yang lebih rinci tentang integrasi ekonomi, seperti tercermin dalam istilah kesatuan perekonomian nasional. Sedangkan rumusan mengenai hak milik perseorangan dan potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dan warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan adalah penjabaran dari kebebasan ekonomi, yang didalam sistem ekonomi Indonesia dibatasi demi kepentingan umum.⁵⁷ Indonesia kelihatannya cenderung untuk menggabungkan prinsip individualisme dengan komunitarianisme.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat terdapat konsep kesinambungan pembangunan yaitu kestabilan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan dalam kerangka ekonomi Pancasila, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan lebih lanjut menjadi asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika diterjemahkan ke dalam konsep pembangunan, maka pembangunan pertama bertujuan menghapus kemiskinan. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu prinsip kemanusiaan

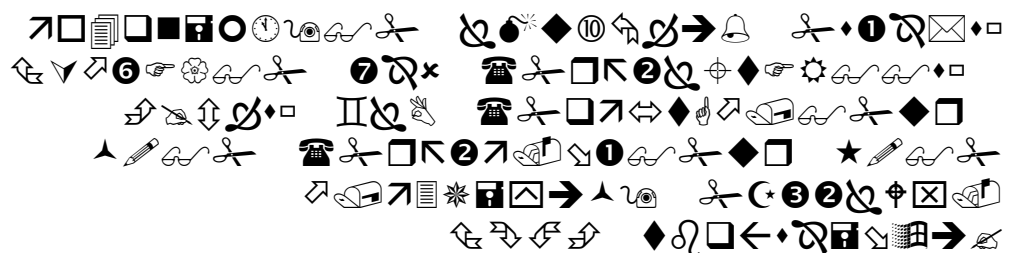
⁵⁶ Muhammad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988) , h. 20 - 28

⁵⁷ Ainur R. Sophiaan, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), h. 120

dirumuskan menjadi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Dalam hal ini terkait adanya dibolehkannya hak milik.

Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam pasal 584 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt),⁵⁸ yaitu dengan cara pemilikan. Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585 – 624 KUHPdt. Misalnya cara memperoleh hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun juga, cara memperoleh hak milik binatang buruan atau perikanan, cara mendapat hak milik atas sesuatu harta karun dan seterusnya.⁵⁹

Dalam Islam sendiri tidak hanya membebaskan pengikutnya agar turut dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dalam mencari harta duniawi, tetapi juga mendorongnya untuk bekerja mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan bagaimana cara perolehan terhadap hak milik. Sebagaimana dalam QS. al-Jumu'ah, 57: 10, Allah SWT berfirman :

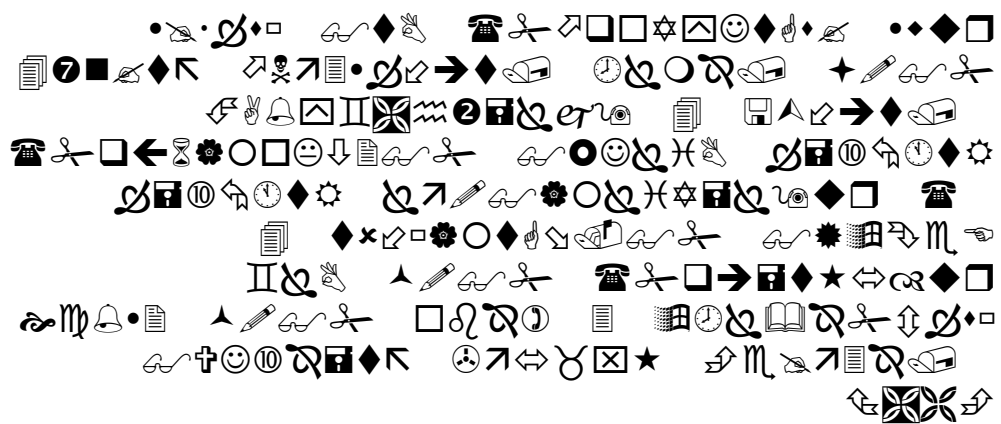


⁵⁸ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 18

⁵⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab UU Hukum Perdata (Terjemahan)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974), Cet.ke-6, h. 168-169.

Artinya : *Apabila ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah.*⁶⁰

Dalam ayat lain, Allah Swt, mengingatkan kepada manusia agar jangan melupakan untuk berusaha dalam mencari rezeki atau karunianya dimuka bumi ini, sebagaimana firmanNya dalam surat An-Nisa ayat 32 :



Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁶¹

Dari ayat di atas, telah jelas bahwa Islam mengharuskan manusia untuk mencari rizki-Nya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan harta tersebut manusia dapat memberikan sedekah, infaq dan lain-lain. Namun dalam mencari rizki Allah haruslah dengan jujur dan bermanfaat. Sikap monopoli serta menguasai barang untuk dikonsumsi sendiri sangat dilarang

⁶⁰ Deperteman Agama RI, *Op.cit*, h. 441

⁶¹ *Ibid* h. 66

oleh Islam. Ini menandakan bahwa cara perolehan hak milik dalam Islam adalah dengan cara yang jujur dan bermanfaat.

Menurut Adam Smith, bahwa fondasi dasar bagi pembangunan ekonomi melalui sistem kapitalis adalah adanya factor kapital, dimana faktor itu dijadikan alat ukur untuk keberhasilan perekonomian.⁶² Ini menunjukkan cara perolehan hak milik terkait dengan kapital atau modal, setiap individu bebas untuk mengelola hartanya demi terpenuhinya kebutuhan hidup yang dikehendakinya. Jadi perolehan disini selalu diukur menurut ukuran uang. Sedangkan menurut Karl Mark, bahwa syarat pokok keberadaan pemerintahan borjouis adalah akumulasi kekayaan dalam tangan orang swasta, pembentukan dan penanaman modal. Dimana syarat pokok untuk modal ialah upah buruh.⁶³ Dengan adanya modal besar maka kaum borjouis mampu untuk mempekerjakan kaum buruh dengan memberikan upah yang disebut dengan upah buruh. Dengan upah ini maka kaum buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam memandang masyarakat muslim sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial yang esensial, dimana orang-orang yang terdapat didalam masyarakat tersebut secara ekonomis saling tergantung satu sama lainnya. Bekerja yang dilakukan secara jujur merupakan ladang amal. Islam sangat menekankan pada ketekunan dan kerja keras. Kebesaran Islam terletak pada kehendaknya agar umat Islam menerapkan kebajikan-kebajikan tersebut, tidak

⁶² Rahman El Junusi, *Theologi: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuludin*, Vol 13 No.2, (Semarang, 2002),h. 11

⁶³ Muh. Abdul Mannan, *Op.cit*, h. 355

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Al-Qashas ayat 73 :

[illegible]

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah

64. See, e.g., *NY State v. Peltier*, 2015 WL 3415

⁶⁵ *Ibid* h. 402

⁶⁵ *Ibid* h. 402

BAB IV

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT AFZALUR RAHAMN DI BUKU ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM

A. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman

Keimanan Islam yang mendasar adalah bahwa alam semesta ini dan seisinya, termasuk manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. Seluruh manusia adalah khalifanya, mereka bersaudara satu sama yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi diantara satu dan yang lainnya lantaran ras, jenis kelamin, kebangsaan, kekuatan maupun kekayaan atau harta benda yang dimiliki.

Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syari'ah tidak selalu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, baik kebutuhan spiritual dan material manusia harus dalam keadaan yang seimbang.

Kebutuhan spiritual atau rohani mencakup kedekatan pada tuhan, kedamaian pikiran, kebahagiaan jiwa, keharmonisan keluarga, sosial dan bebas dari perbuatan kriminal. Sementara kebutuhan material mencakup makanan yang cukup, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, keamanan dan kekayaan atau harta yang dimiliki demi untuk kelangsungan hal tersebut.⁶¹

⁶¹ Umer Chapra, *The Future Of Economics*, (Jakarta : Asy Syamil Pres & Grafika, 2001), h. 60

Memiliki suatu benda, sama halnya mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan, selama tidak terdapat larangan syara'.⁶² Menurut Afzalur Rahman Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, yang mampu diperoleh menurut cara yang halal dan membenarkan seseorang untuk mendapatkan seberapa banyak harta yang mampu diperolehnya, menurut pengetahuan, kemahiran dan tenaganya dengan menggunakan cara-cara bermoral dan tidak anti sosial. Walaupun begitu ia memberikan batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat

Dalam karyanya *Economic Doctrines Of Islamic Afazalur rahman* mengemukakan tentang konsep kepemilikan harta yaitu *recognizing the right of individual for posses the property. In spite of that he gave same limitation in order that is not inflicted of common infortune people. Because of that, Afzalur rahman stressed the limit of individual freedan in reach the property, the are :*

1. *Individual is free in struggling of their economic as long as it is not break the rights of others or endanger of common infortune people*
2. *For defend of their life, they have to do right ful and leaving that fatidden to reach the property and not taking the fortidden things.*⁶³

Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan tanpa izin dari pemilik resmi. Menurut syara', kepemilikan

⁶² Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 25

⁶³ Afzalur Rahman, *Op.cit*, h. 8

adalah sebetulnya ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan, syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut *Asba al milk* (asal-usul kepemilikan). Ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk mengatur dan memanfaatkan harta yang dimilikinya tanpa campur tangan orang lain, dalam artian orang lain tidak berhak untuk melarang seseorang dalam pemanfaatan hartanya. Sehingga hak pemilikan penuh ada pada setiap individu yang mempunyai harta.⁶⁴

Walaupun Islam memberikan kebebasan tersebut kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi disamping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah yang baik dalam memperoleh harta tersebut, supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah. Yang pada akhirnya nanti akan mendorong jatuhnya martabat halaqul karimah serta mengganggu masyarakat.⁶⁵

Sebagian para kapitalis ada yang mengidentikkan kepemilikan dengan menguasai suatu hal. Padahal kepemilikan disini bukan terkait dengan hal yang bersifat materi. Adapun pandangan Islam, sesuai realitas ayat al-Qur'an, bahwa faktor kepemilikan adalah jelas, tidak remang seperti rumusan para pembuat undang-undang kapitalis. Rumusan Islam bermula dari Iman kepada Allah SWT dan kemakhlukan manusia.⁶⁶

⁶⁴ Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op. cit.*, h. 25

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, h. 77

⁶⁶ Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op.cit.*, h. 26

Dalam hal kepemilikan tidak hanya sebatas menguasai sesuatu yang bersifat materi saja, namun ketika individu mampu menguasai sesuatu maka harus bisa di manfaatkan untuk kemaslahatan bersama, karena sebagai wujud kepedulian terhadap sosial masyarakat. Sehingga penguasaan di sini tidak sebatas pada segelintir orang saja, tapi bisa dirasakan oleh makhluk sosial lainnya. Dari sini, maka menurut Afzalur Rahman muncul dua paham atau golongan terkait dengan kepemilikan, yaitu paham spiritual dan paham material.

1. Paham Spiritual atau Rabaniyah.

Paham pemikiran spiritualisme lebih menekankan pada aspek moral, kerohanian dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Pelopor paham spiritualisme menganggap semua aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bertumpu pada do'a. Sehingga kepemilikan tidak begitu ditekankan.

2. Paham Material (kebendaan)

Golongan materialis menekankan pada aspek kebendaan dalam hidup manusia. Segala ikhtiar dan usaha manusia hanya terfokus pada pencapaian kebendaan, sedangkan aspek moral dalam hidup diabaikan. Mereka memberikan perhatian yang amat sedikit atau tidak secara langsung terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam persaudaraan dan kasih sayang. Semua tertumpu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Pelopor paham ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, baik dengan jalan

yang benar maupun tidak. Sehingga paham ini menganggap bahwa kepemilikan adalah sarana untuk menguasai suatu hal yang terkait dengan materi.⁶⁷

Dari dua paham diatas, maka Islam mengambil jalan yang terbaik dan mencoba menempatkannya pada proporsi yang tepat. Dalam hal ini, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Akan tetapi jika mengutamakan aspek moral tanpa disertai aspek kebendaan , maka dalam Islam tidak dibolehkan. Islam membolehkan adanya kepemilikan, baik kepemilikan individu atau umum. Islam tidak menekankan bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif, karena dengan demikian sama halnya merobek hak individu pemilik dari apa yang dimilikinya sekaligus memberi ruang luas pada masuknya intervensi pemerintah yang mengesahkan penghapusan hak milik. Untuk itu Islam mengakui aspek kebendaan dalam artian kepemilikan , dimana dengan kepemilikan ini diusahakan mampu memanfaatkan sebaik- baiknya untuk kemanfaatan bersama.

Adapun Islam tidak menganjurkan bahwa kepuasan untuk mencapai kehendak-kehendak ekonomi sebagai suatu keharusan bagi dirinya.⁶⁸ Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kepuasan perolehan materi maka setiap

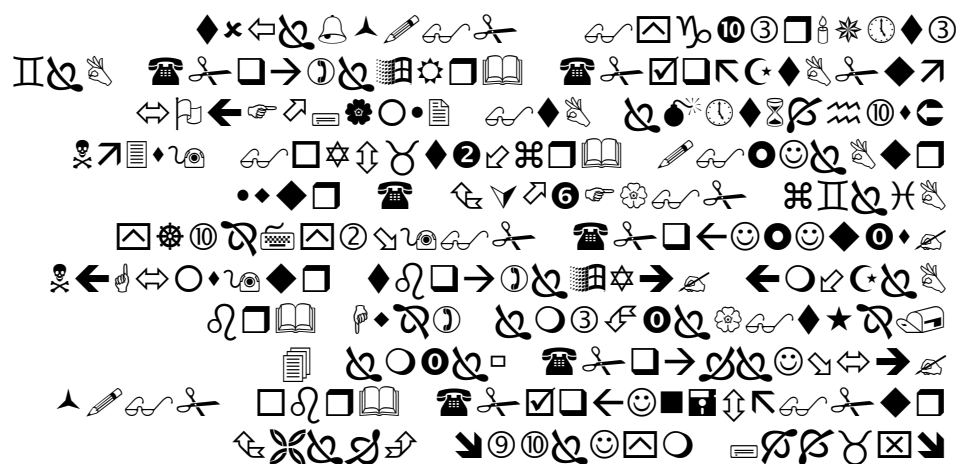
⁶⁷ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, h. 12-13.

⁶⁸ *Ibid.* h.118

individu di anjurkan untuk bekerja keras, sehingga kepuasan tersebut mampu di rasakan oleh masyarakat umum melalui infak dan shodaqoh.⁶⁹

Dimana infak dan shodaqoh merupakan salah satu cara untuk memelihara kualitas moral umat, dimana bagi mereka yang mempunyai harta yang berlebihan dianjurkan untuk digunakan memberi layanan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan umum dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara menyalurkan, menginfakkan atau shodaqoh dari harta yang berlebih tersebut kepada mereka yang membutuhkan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.⁷⁰

Anjuran menginfakkan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang lain sudah dijelaskan Allah Swt, dalam al-Qur'an, sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 267



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan*

⁶⁹ Taqiyudin An-Nabahan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2002), h. 237.

⁷⁰ Afzalur Rahman, *Op.cit.* h. 61-62

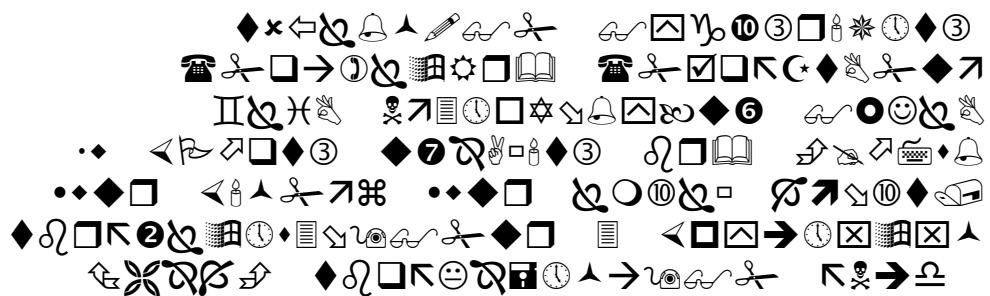
*daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁷¹

Dari ayat tersebut Allah Swt, memerintahkan kepada setiap orang yang memiliki harta kekayaan agar menafkahkan harta yang dirizkikan-Nya, karena didalam harta yang kita miliki tersebut juga terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁷²

Secara umum menurut Afzalur Rahman hak milik terhadap harta ada dua macam, yaitu hak milik pribadi dan hak milik umum.

1. Hak Milik Pribadi

Kepemilikan pribadi yaitu harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang halal yang diperolehnya dengan kemampuan, kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak anti social yang selanjutnya harta tersebut digunakan untuk yang bermanfaat.⁷³ Di dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqaroh ayat 254



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak*

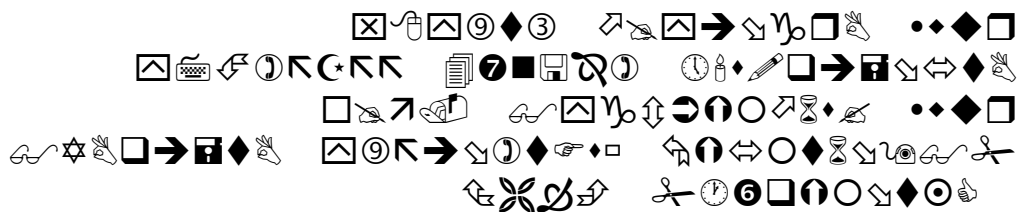
⁷¹ Departemen Agama RI, *Op.cit* h. 35

⁷² Solahuddin, M. *Op.cit.*, h.137

⁷³ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, h. 95-96

*ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.*⁷⁴

Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan, namun tidak mau memanfaatkannya dianggap sebagai orang yang bertindak bakhil dan akan mendapatkan dosa. Karena Allah Swt, menganugerahkan kekayaan sebagai sebuah kenikmatan yang layak untuk dinikmati. Firman Allah Swt, dalam surat Al-Isra' Ayat 29



Artinya : *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*⁷⁵

Menikmati dari harta yang dimilikinya baik dalam menggunakannya atau mengambil manfaatnya seseorang juga dibebankan tanggung jawab kepada masyarakat, seseorang seharusnya menyadari bahwa ia hanya sebagai pemegang amanah atas harta tersebut, oleh karena itu dalam menikmati haknya ia tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu kepentingan umum.

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mencegah kecenderungan sebagian pemilik harta benda yang bertindak sewenang-wenang dalam masyarakat. Pemilik harta benda yang baik adalah yang bertenggang rasa

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit* h. 33

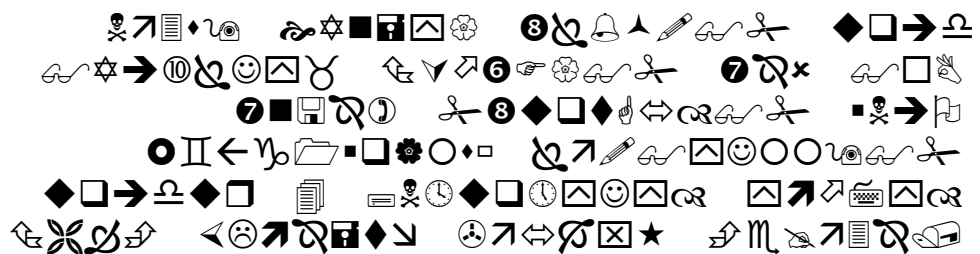
⁷⁵ *Ibid*, h. 227

dalam menikmati hak mereka dengan bebas tanpa dibatasi dan dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik.⁷⁶

2. Hak milik Umum

Pada dasarnya semua benda yang ada dimuka bumi ini diciptakan untuk manusia dan harus dipertanggungjawabkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya serta harus didistribusikan dengan adil dalam masyarakat.⁷⁷

Firman Allah Swt, Dalam surat Al-Bagarah ayat 29



Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk*

kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

*Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*⁷⁸

Menurut Afzalur Rahman hak milik umum adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Sebagian benda yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat berada di pengawasan umum, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada individu, sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual, dan mewariskannya.

⁷⁶ Afzalur Rahman, *Op.cit.* h. 107

⁷⁷ *Ibid.* h. 113

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit* h. 6

Pengawasan umum dalam hal ini dilakukan oleh Negara atau pemerintah ini dilakukan agar terwujudnya pendistribusian harta benda yang merata ke masyarakat. Pemerintah atau Negara berhak untuk memiliki benda-benda tersebut, mengelola dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorangpun maupun berkelompok untuk menguasainya untuk kepentingan sendiri atau kelompok tetapi bertentangan dengan kepentingan umum.⁷⁹

Menurut Asy Syari' hak milim umum yaitu adanya izin kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda.⁸⁰ Menurut Tokoh ekonomi Jerman Frederick Engels, dalam buku Dasar Kapital yang terbit tahun 1917, mengatakan bahwa negara harus diperintah oleh rakyat berbentuk diktator ploretariat. Pemerintahan oleh rakyat inilah yang memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah hanya melaksanakan pemerintahan atas nama kaum ploretar.⁸¹ Ini menunjukkan bahwa dalam kepemilikan umum, pemegang kekuasaan ada pada diri rakyat, sehingga pemanfaatan benda dapat dirasakan bersama tanpa campur tangan pemerintah.

B. Implementasi Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Pada Saat Ini

⁷⁹ Afzalur Rahman, *Op.cit* . h.112 – 114

⁸⁰ Taqiyudin An-Nabahan, *Op.cit.*, h. 237.

⁸¹ Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18

Dewasa ini keberadaan sistem ekonomi dikenal berbagai istilah, diantaranya ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi sosialis seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik Negara atau masyarakat keseluruhan, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak dibolehkan, dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan. Sedangkan kapitalis setiap Negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya, individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.⁸²

Melihat bahwa kapitalis tumbuh dan berkembang dengan adanya istilah “*kapital*“, untuk itu kapitalis memandang pemilikan harta adalah hak milik mutlak berada di tangan individu, dimana peran utama dalam menguasai harta adalah individu.⁸³

Dalam Ekonomi Islam sendiri, telah jelas mengenai sistem ekonomi, dimana keaslian Islam dalam memandang ekonomi adalah dengan menitik beratkan moral dan rohani sebagai landasan berekonomi. Kewajiban moral dengan gigih mengendalikan dan memperkuat tekanan ekonomi agar selaras dengan ketentuan filsafat moral Islam.

⁸² Afzalur Rahman, *Op.cit* . h. 02 - 06

⁸³ Syed Nawab Naider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung : Mizan), h. 114.

Islam tidak memiliki otoritas dalam proses ekonomi, sedang campur tangan negara ditujukan untuk mengokohkan pertentangan sosial yang mungkin terjadi antara perilaku moral dan ekonomi manusia yang telah mengarahkan masyarakat pada jalan perbudakkan. Sedang sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah itu sama-sama untuk beribadah kepadanya. Untuk itu Islam sangat menghormati hak milik orang lain atau individu. Pengakuan hak milik perseorangan adalah berdasarkan kepada tenaga dan pekerjaan, baik sebagai hasil pekerjaan sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan dari keluarganya yang meninggal.⁸⁴

A. Wahab Khalaf menegaskan dalam bukunya *asy-Syiyasatus asy-Syari'ah*, bahwa dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada yang lain ialah “*an taradhin*” (karena atas suka dan ridho). Dia mengemukakan tiga ketentuan bagi pengakuan hak milik dalam Islam.⁸⁵

1. Larangan memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah.
2. Menghukum orang-orang yang mencuri, merampas atau mengambil barang yang bukan miliknya baik secara main-main, apalagi kalau benar-benar mengambilnya.
3. Larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan *khiyar* (berfikir meneruskan atau membatalkan jual beli) dalam masa tiga hari. Dari ketiga ketentuan di atas, dimaksudkan agar harta yang kita miliki benar-benar bersih dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga untuk memberikan

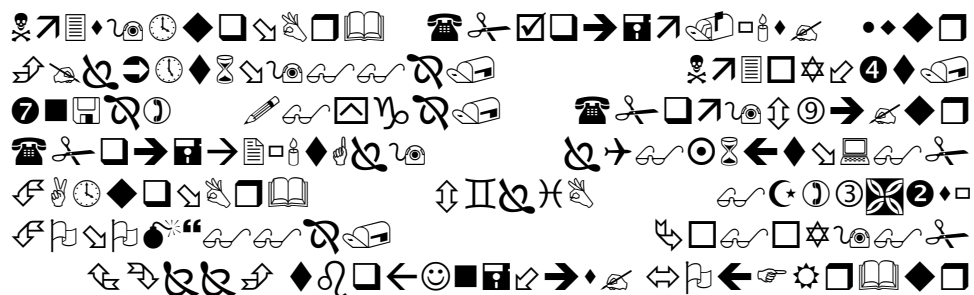
⁸⁴ H. Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 135.

⁸⁵ *Ibid*

pelajaran bagi orang-orang yang berani untuk mencuri dan serta mengajarkan bagaimana jujur dalam jual beli. Semua ini tidak lain untuk kemaslahatan bersama sehingga terhindar dari kekacauan di masyarakat. Adapun batas-batas yang ditetapkan oleh agama Islam dalam mengimplementasikan hak milik adalah :⁸⁶

- a. Melarang pengambilan harta orang lain, kecuali dengan jalan yang sah.

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. 2 : 188.



Artinya : *Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantara kamu, dan kamu pergunakan tangan kakimu untuk dapat mengambil sebagian harta orang lain dengan jalan yang tidak sah sedang kamu mengetahui.*⁸⁷

- b. Mengharamkan riba dan perjudian. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. 2 : 275 dan 276. dan QS.3:130, Allah menetapkan diharamkannya riba dan QS.2:219, Allah mengharamkan perjudian..
- c. Melindungi harta anak yatim dan *safieh* (orang yang tidak sanggup menjaga hartanya.) Sebagaimana dalam QS.Al-Isra:24 dan QS4:9 Allah melarang memakan harta anak yatim yang di dalam

⁸⁶ *Ibid*, h. 136.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit* h. 23

penjagaannya dengan jalan yang tidak sah QS.4:55 Allah menetapkan perlindungan atas harta orang-orang yang *safieh*.

- d. Mencegah peredaran harta dan kekayaan di antara orang-orang kaya saja. Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr : 7 Allah berfirman bahwa janganlah diberi kesempatan harta benda hanya beredar dikalangan orang-orang kaya belaka. Susunan ekonomi harus diatur begitu rupa sehingga seluruh manusia dapat mempunyai hak milik.
- e. Menyerahkan jaminan bagi orang-orang yang terlantar. Sebagaimana dalam QS. al-Isra : 26, diperintahkan sokongan atas kerabat, orang-orang terlantar dalam perjalanan. Di dalam zaman modern ini, lebih peraktis jaminan itu kalau diserahkan kepada organisasi-organisasi sosial yang menjurus masalah di atas. Meskipun sangat terlihat jelas implementasi hak milik dalam kedua sistem ekonomi di atas (sistem kapitalisme dan Islam) saling bertentangan, tetapi masih ada yang beranggapan bahwa antara Islam dan kapitalis ada sedikit relevansinya yaitu dalam menghargai kebebasan individu.⁸⁸

Jika dalam kapitalisme beranggapan bahwa adanya pengaturan terhadap hak individu secara mutlak dan Islam pun mengakui hak milik individu, namun dalam hal ini kapitalisme lebih pada penguasaan harta mutlak milik individu, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikan.

⁸⁸ Syeh Nawab Haider Naqvi, *Op. cit.*, h. 112.

Dalam menghargai kepentingan untuk hak milik umum, dari terdahulu sampai dengan saat ini kapitalisme mewajibkan pembayaran pajak, namun dititikberatkan pada tanggungjawab individu yang kaya, tanpa campur tangan pemerintah. Padahal, jika melihat basis individu dalam masyarakat kebanyakan melakukan penyerobotan dari pada pemberian.⁸⁹ Bahkan sampai penghindaran dan pengelakan pajak, hal ini disebabkan karena tidak ada pengawasan dari negara. Sedang negara hanya sebagai pengelola dengan memberi kebebasan kepada individu. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak menitikberatkan pada tanggungjawab kolektif, sebagaimana yang telah dilakukan Islam.

Dalam Islam sendiri juga terdapat hak milik umum yaitu berupa zakat namun bukan dalam artian biasa tetapi dalam arti khusus yang dipungut dari anggota-anggota masyarakat muslim saja dan dibayar oleh mereka sebagai kewajiban agama yang implementasi untuk mencari keridha Allah Swt,⁹⁰ dan merupakan sebagai alat kebijaksanaan Islami. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa didalam harta yang dimiliki seseorang tersebut terdapat hak-hak orang lain.

Menurut Afzalur Rahman masyarakat yang kaya harus membayar pungutan tahunan atau hari-hari lain dalam hal ini zakat sebagai mana yang telah diwajibkan oleh Allah Swt dalam al-qur'an dan hadits atas kekayaan yang terkumpul untuk kaum miskin dan yang memerlukannya dalam masyarakat.

⁸⁹ *Ibid*, h. 116.

⁹⁰ Afzalur Rahman, *Op.cit*, h. 150

Ini merupakan bentuk asuransi terbaik bagi masyarakat, sehingga menghilangkan semua kejahatan yang berasal dari tiadanya peraturan resmi yang mengatur kerja sama dan bantuan-bantuan kolektif.

Dengan zakat menyediakan sarana kebutuhan hidup bagi yang memerlukan dan terlantar, membantu meningkatkan daya beli mereka, memperluas perdagangan, industri dan kegiatan usaha lain dalam masyarakat, hal ini juga membantu menegakkan keseimbangan yang mantap antara produksi dan konsumsi dalam masyarakat Islam sehingga membebaskan masyarakat dari kejahatan yang muncul dari lingkaran perdagangan dan yang muncul dari daerah kumuh.⁹¹

Karena salah satu dari tujuan zakat yang penting adalah untuk mempersempit perbedaan ekonomi di masyarakat sampai batas serendah mungkin. Hal ini bertujuan karena untuk menjaga perbedaan ekonomi di kalangan masyarakat dalam batas-batas yang adil dan wajar sehingga sikaya tidak boleh tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota komunitas yang kurang beruntung sedangkan simiskin menjadi semakin miskin.

Nabi menjelaskan zakat sebagai uang yang diambil dari orang yang kaya yang dikembalikan pada orang miskin. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat yang adil dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak sorang muslimpun yang dibiarkan miskin.⁹²

Oleh karena setiap orang kaya harus mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan. Dalam hal ini pemerintah harus memaksa si kaya untuk

⁹¹ *Ibid.* h. 70

⁹² *Ibid.* h. 152

mengeluarkan zakat yang sama halnya bahwa pemerintah telah membangun pilar penting dalam proyek penyejahteraan rakyat dan sekaligus telah membangun pilar keadilan sosial.⁹³ Adapun perlunya pengawasan pemerintah terhadap harta zakat adalah dimulai dari tahapan penarikan atau dalam pengoperasian. Menurut M. Faruq an-Nabahan, sistem pengawasan pemerintah secara garis besar dapat dikategorikan pada dua hal berikut ini :

1. Mengawasi sistem penarikan zakat.

Pemerintah bisa menugaskan aparat perpajakan dalam mengecek harta apa saja yang harus dizakati. Pemerintah juga harus memiliki dewan kehormatan zakat yang menjamin bahwa zakat dioperasikan sesuai program agung syariah.

2. Pengoperasian harta hasil zakat.

Harta zakat sangat berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Di mana zakat sebagai solusi yang sangat realistis dalam penyelamatan problem sosial di era modern. Dalam mengalokasikan harta zakat, bisa dimulai dengan mengkategorikan para *mustahiq* (yang berhak atas zakat) ke dalam berbagai kelas, dalam artian sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk yang telah lemah bekerja, maka diberikan kebutuhan rutin perbulan, kemudian untuk yang berpenghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka diberi tambahan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

⁹³ M. Faruq an-Nabahan, *Op.cit*, h. 111.

Pemberian zakat tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan mereka, bahkan bisa berupa asuransi untuk menjamin mereka yang tidak bekerja.⁹⁴

Selain zakat, Islam memerintahkan manusia untuk memberikan sedekah atau shodaqoh, yaitu pengeluaran wajib untuk membantu fakir miskin, atau usaha-usaha sosial lainnya yang harus dibantu, misalnya akibat bencana alam, kelaparan dan sebagainya. Dan juga memberikan amal kebajikan, kebenaran, berupa bantuan secara umum dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memperoleh bagian yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Cara terbaiknya adalah dengan menyalurkannya kepada orang lain yang membutuhkannya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Keadaan seperti ini dianggap sebagai salah satu sikap moral tertinggi dalam Islam.

Hukum hanya mengambil sebagian tertentu (tidak seluruhnya) harta si kaya dan tidak melebihi batas tertentu. Tetapi pendidikan moral memberikan hasil yang jauh lebih luas dan membangkitkan semangat semacam itu diantara umatnya sehingga mereka menyerahkan seluruh hartanya kepada jalan Allah dalam hal ini infak.⁹⁵

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

⁹⁴ *Ibid*, h. 113.

⁹⁵ Afzalur Rahman, *Op.cit.* h. 61 - 62

ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Di Indonesia sendiri pada saat ini praktek pengelolaannya, pengumpulan dan penyaluran dana zakat itu sendiri sudah berkembang, hal ini ditandai dengan adanya peran serta langsung pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga khusus yang mengelola zakat tersebut, dari pusat hingga tingkat kecamatan yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sodalqoh dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal ke Negaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dari pusat hingga

tingkat daerah dan lembaga zakat yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Substansi utama Undang-Undang Pengelolaan zakat adalah pengaturan harta obyek zakat dan pendayagunaan, serta pengaturan organisasi pengelola zakat. Dalam Undang-Undang tersebut organisasi pengelola zakat dibedakan menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Kedua organisasi pengelola zakat tersebut pada dasarnya merupakan pengganti peran otoritatif pemerintah dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, kedua organisasi ini memiliki kelemahan mendasar karena sebagai otoritas pengelola zakat, undang-undang tidak memberikan kekuatan memaksa organisasi pengelola zakat kepada para muzakki.

Namun, setidaknya dengan Undang-undang Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.⁹⁶

C. Analisa Konsep Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman.

Dalam Islam sesungguhnya kebebasan dianggap sebagai pondasi nilai-nilai dan martabat seluruh umat manusia.. Al-qur'an mempertahankan kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah, tetapi juga menegaskan dengan

⁹⁶ http://myquran.com/forum/archive/index.php/t-18502.html/peraturan_lembaga_zakat/
Rabu, 26 Mei 2011

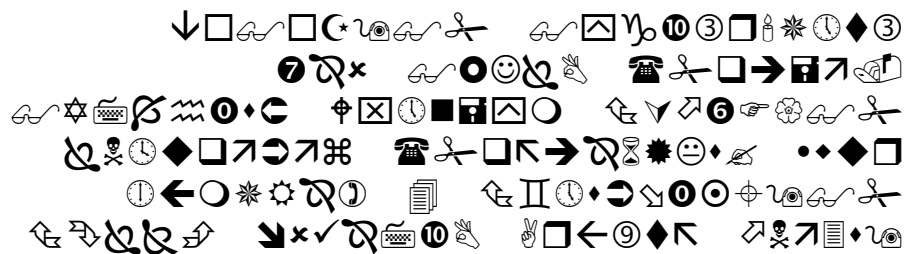
perhatian yang sangat besar kebebasan untuk memilih pada manusia. Sifat yang mendasarnya adalah hak memilih secara bebas ketika terbuka peluang untuk melakukan pilihan.

Setiap individu memperoleh kebebasan sempurna dalam berfikir, bertindak dan memperoleh mata pencaharian dalam Negara Islam. Ia memiliki kebebasan untuk memulai, berorganisasi, mengatur dan memiliki perusahaan dalam batas kemampuannya, ia juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dengan sejumlah syarat yang sesuai, dan hak untuk bekerja sama dalam profesi yang digemarinya. Secara tegas tidak ada batasan untuk berpindah kerja dari satu bidang ke bidang lain, setiap orang bebas untuk berpindah dalam memilih mata pencaharian dan bebas mengambil harta yang halal maupun memperoleh sesuatu yang haram.

Menurut Afzalur Rahman seseorang mempunyai hak untuk memiliki harta yang diperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka hatinya. Hak milik pribadi tidak boleh diperluas jangkauanya sehingga membahayakan sistem Islam yang mendasar dan selanjutnya menghancurkan tujuan yang sebenarnya. Karena itu pada perinsipnya kepemilikan seseorang dibolehkan, tetapi bagaimanapun juga hak milik pribadi itu harus dibatasi agar tidak berbahaya.

Oleh karena itu Afzalur Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta, diantaranya yaitu :

1. Individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat).
2. Guna mempertahankan kehidupannya ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram .⁹⁷ Sebagaiman Firman Allah Swt dalam Al-Qura'an al-baqarah ayat 168



Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁹⁸

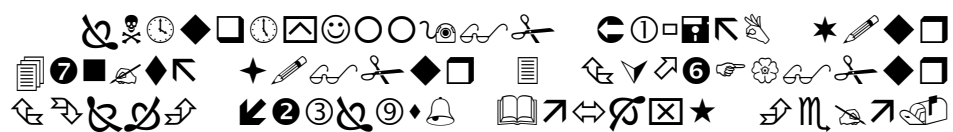
Menurut Yusuf al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa merupakan harta sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi islam mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang

⁹⁷ Afzalur Rahman, *Op.cit* , h. 75-77

⁹⁸ Depertemen Agama RI, *Op.cit* h. 20

disayari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disayari'atkan pula.⁹⁹

Dalam hal ini Abdul Manan juga berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Swt, dan manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 189.



Artinya : *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.*¹⁰⁰

Dalam memiliki harta Abdul Manan juga menentukan beberapa ketentuan, terhadap seseorang atau kelompok dalam memperoleh harta, diantaranya adalah :

- a. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimilikinya.
- c. Penggunaan harta benda secara berfaedah
- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
- e. Memiliki harta benda yang sah
- f. Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah
- g. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya

⁹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.cit*, h. 86

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Op.cit*, h. 59

h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam

Dengan cara inilah menurut Abdul Manan untuk mempertahankan keseimbangan dalam memperoleh dan menggunakan harta benda bagi seseorang.¹⁰¹

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bahkan bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Oleh karena itu menyangkut masalah individu, hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim bersepakat pada prinsip-prinsip berikut ini:¹⁰²

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu .
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

¹⁰¹ Abdul Manan, *Ibid*, h. 72

¹⁰² Rahman el-Junusi, “*Pandangan Islam Terhadap The Theory of “Invisible Hand” ADAM SMITH*” dalam *Theologia Jurnal Ilmu Ushuluddin Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang*, 2002, h. 16.

Islam memberikan kebebasan serta hak milik kepada individu dan mengelola usaha secara pribadi, akan tetapi tanpa merusak ekonomi masyarakat. Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak atau absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan tidak dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya.¹⁰³

Pada hakikatnya individu hanyalah wakil dari masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu atau pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang disertai amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta benda tersebut hanya bersifat sebagai uang belanja. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik masyarakat. Masyarakat disertai tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah.¹⁰⁴

Dari pemikiran-pemikiran Afzalur Rahman diatas maka penulis dapat mengemukakan secara garis besar bahwa pemikiran Afzalur Rahman ini sangat menunjang sekali dalam meningkatkan perekonomian, dimana dalam memiliki harta kita dituntut untuk berusaha memperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya dengan cara yang halal dan baik, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka

¹⁰³ Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, h. 6.

¹⁰⁴ Suhrawardi K. Lubis *Loc.cit*, h. 6.

hatinya. Hak milik pribadi tidak boleh diperluas jangkauannya sehingga membahayakan sistem Islam yang mendasar dan selanjutnya menghancurkan tujuan yang sebenarnya. Karena itu pada perinsipnya kepemilikan seseorang dibolehkan, tetapi bagaimanapun juga hak milik pribadi itu harus dibatasi agar tidak berbahaya.

Disamping itu harta yang kita miliki tersebut tidak sepenuhnya milik kita sendiri, karena dalam harta tersebut juga terdapat hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada yang membutuhkannya dalam hal ini salah satunya berupa zakat. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan professional.

Menurut hemat penulis kesenjangan ekonomi bisa diatasi jika konsep-konsep yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman diImplementasikan dengan baik, karena pada dasarnya apa yang dikemukakannya tidak terlepas dengan atauran-aturan yang ditentukan oleh Islam.

Penulis dapat menganalisa apa yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman dalam memperoleh harta dapat dijadikan alternative dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam memiliki dan mendistribusikan harta serta adanya kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan dalam ekonomi yaitu dengan

adanya pengaturan wajib dan sukarela untuk membantu satu sama lain yang membutuhkan melalui instrument zakat, infaq, sodakoh serta pajak.

Pada saat implementasi dari kepemilikan harta tersebut sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Namun walaupun begitu masih terdapat kebaikannya, hal ini terlihat dengan pengakuan terhadap hak orang lain dari harta yang kita miliki melalui instrument zakat, infaq dan sodakoh, sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa diperoleh dengan cara yang halal baik bentuk zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, penulis mengambil beberapa intisari sebagai kesimpulan dan uraian peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.
2. Pada saat ini implementasi dari kepemilikan harta dikalangan muslim sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Setiap orang berlomba-lomba dalam mencari harta dengan cara-cara yang tidak baik yang lebih mengarah kearah kapitalis dan sosialis, yaitu setiap orang selalu merasa penguasa mutlak terhadap harta

yang dimilikinya, tanpa memikirkan orang lain, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikannya, hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya alam dan manusia, akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin.

3. Dari pemikiran-pemikiran Afzalur Rahman penulis sependapat bahwa pemikiran Afzalur Rahman ini sangat menunjang sekali dalam meningkatkan taraf perekonomian, dimana dalam memiliki harta kita dituntut untuk berusaha memperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya dengan cara yang halal dan baik, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka hatinya. Hak milik pribadi tidak boleh diperluas jangkauanya sehingga membahayakan sistem Islam yang mendasar dan selanjutnya menghancurkan tujuan yang sebenarnya. Karena itu pada perinsipnya kepemilikan seseorang dibolehkan, tetapi bagaimanapun juga hak milik pribadi itu harus dibatasi agar tidak berbahaya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa di peroleh dengan cara yang halal baik bentuk zat nya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah

manusia, tidak juga melakukan penganiyaan dan pengeksploitasian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, penulis ingin memberikan saran kepada seluruh umat islam terlepas dari status penulis sebagai orang Islam, bahwa Islam itu memang diturunkan Allah SWT sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Ajaran-ajaran yang disampaikan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akherat, yaitu ajaran yang mengajarkan untuk hidup bermasyarakat dengan didasari nilai-nilai Islam, sehingga kesejahteraan menjadi milik bersama, dan orientasi untuk memperoleh Ridho Allah SWT semata.

Kemudian bagi para cendikiawan dan para pemikir muslim hendaknya dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Afzalur Rahman agar dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang teori-teori masa kini.

Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

_____, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Shuarna Bhummy, 1997)

Ahmad, Muhammad al 'Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsipprinsip dan Tujuannya*, Terjemahan oleh Abu Ahmad dan Umar S, (Jakarta : Bina Ilmu, 1980)

Adiwarman, Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IT Indonesia, 2002)

Ash-Shadr Muhammad Syahid, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002)

Antonio, Syafi'I Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)

Ali Daud Muhammad , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988)

Bably Mahmud Muhammad, *Kedudukdn Harta Menurut Pandangan Islam*, (Semarang : Kalam Mulia, 1987), Cet.I

Chapra, Umer M. Dr, *The Future Of Economics*, (Jakarat : Asy Syamil Pres & Grafika, 2001)

Endang Saifudin Anshori, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986)

Hendi, Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

HA Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1986)

Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000)

M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)

Masqood Waris Ruqaiyah, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), Cet.I

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007)

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Nawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009)

Qordawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), Cet. Ke- I

S. Wiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gita Karya, 1988)

Syarifuddin Amir. Dr.Prof, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), Cet.2

Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta : PPFPUGM, 1963)

Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995)